KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR : 68 TAHUN 2014

T E N T A N G
PERSETUJUAN TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

Menimbang :

a. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 telah ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2014 tentang Persetujuan terhadap Penetapan Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2015;

b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan materi penyusunan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2015, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta memperhatikan ketentuan Pasal 403 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya tentang Persetujuan Bersama Terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 4);

Memperhatikan :

1. Surat Walikota Surabaya Nomor 180/3929/436.1.2/2014 tanggal 8 Agustus 2014 Perihal Penyampaian Daftar Rancangan Peraturan Daerah Program Legislasi Daerah Kota Surabaya Tahun 2015.
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Surabaya;
3. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 9 - P Tahun 2014 tentang Rencana Kerja (Renja) dan Anggaran DPRD Kota Surabaya Tahun 2015;
4. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 903/3432/436.7.1/2014 / 34 Tahun 2014 7 Juli 2014 Nomor tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan perubahannya;
5. Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 903/3433/436.7.1/2014 / 35 Tahun 2014 7 Juli 2014 Nomor tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
6. Surat Ketua DPRD Kota Surabaya Nomor 172/2220/436.5/2014 tanggal 4 Nopember 2014 perihal Raperda Usul Prakarsa;
7. Surat Komisi A DPRD Kota surabaya Nomor 06/Kom.A/XI/2014 tanggal 12 Nopember 2014 perihal Usulan Raperda Usul Prakarsa;
8. Surat Komisi B DPRD Kota surabaya Nomor 03/Kom.B/XI/2014 tanggal 10 Nopember 2014 perihal Usulan Raperda Usul Prakarsa;
9. Surat Komisi C DPRD Kota surabaya Nomor 006/Kom.C/XI/2014 tanggal 06 Nopember 2014 perihal Usulan Raperda Usul Prakarsa;
10. Surat Komisi D DPRD Kota surabaya Nomor 03/Kom.D/X/2014 tanggal 06 Nopember 2014 perihal Usulan Judul Raperda Inisiatif DPRD;
11. Hasil Rapat Badan Pembentukan Perda DPRD Kota Surabaya, Sekretaris DPRD Kota Surabaya tanggal 3 dan 6 Nopember 2014.
12. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Surabaya tanggal 3 dan 10 Nopember 2014.
13. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya tanggal 12 Nopember 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015.**

KESATU : Memberikan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2015.

KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ini mulai berlaku, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 12 Nopember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,
WAKIL KETUA

MASDUKI TOHA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA SURABAYA
NOMOR : 68 Tahun 2014
TANGGAL : 12 Nopember 2014

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		Pelaksanaan	DISERTAI		SKPD/ Unit kerja/ instansi terkait	Ket.
			Baru	Ubah		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Raperda tentang Rehabilitasi daerah kumuh / permukiman kumuh	Raperda tentang Rehabilitasi daerah kumuh / permukiman kumuh	V						DPRD (A)
2.	Raperda tentang Pajak Online	Raperda tentang Pajak Online	V						DPRD (B)
3.	Raperda tentang Manajemen Kontruksi	Raperda tentang Manajemen Kontruksi	V						DPRD (C)
4.	Raperda tentang Pelayanan Tenaga Kerja	Raperda tentang Pelayanan Tenaga Kerja	V						DPRD (D)
5.	Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir	Raperda tentang Penyelenggaraan Parkir	V						DPRD (BPP)
6.	Raperda tentang Corporate Sosial Responsibility (C.S.R.)	Raperda tentang Corporate Sosial Responsibility (C.S.R)	V						DPRD (BPP)
7.	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	V		1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	V		1. Badan Perencanaan Pembangun; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Tenaga Kerja; 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5. Kantor Imigrasi; 6. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Jawa	DPRD

								Timur;	
8.	Raperda tentang Upaya Kesehatan Daerah	Raperda tentang Upaya Kesehatan Daerah	V		Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	V		1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.	**DPRD**
9.	Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Surya Artha Utama	Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Surya Artha Utama	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		1. Badan Perencanaan Pembangun; 2. Badan Koordinasi dan Pelayanan Penanaman Modal; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	**DPRD**
10.	Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Jatim	Raperda tentang Penyertaan Modal kepada PT. BPR. Jatim	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		1. Badan Perencanaan Pembanguna; 2. Badan Koordinasi dan Pelayanan Penanaman Modal; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	**DPRD**
11.	Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional	Raperda tentang Penataan Pasar Tradisional	V		Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V		1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 2. PD Pasar Surya.	**DPRD**
12.	Raperda tentang Izin Mendirikan Reklame dan Pajak Reklame	Raperda tentang Izin Mendirikan Reklame dan Pajak Reklame	V		Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V		1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 4. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.	**DPRD**
13.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Pemungutan Retribusi terhadap Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga	V		1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 2. Peraturan Pemerintah	V		1. Badan Perencanaan Pembangun; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Tenaga	

	Indonesia	Asing Indonesia			Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing			Kerja; 4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana; 5. Kantor Imigrasi; 6. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur;	
14.	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air	Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Surabaya	V		1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air			1. Badan Perencanaan Pembangun; 2. Badan Lingkungan Hidup.	
15.	Pengelolaan dan Perlindungan Air Tanah	Pengelolaan dan Perlindungan Air Tanah	V		1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;	V		1. Badan Perencanaan Pembangun; 2. Badan Lingkungan Hidup; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	

16.	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga	Pedoman Pembentukan Organisasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakat an	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan	V		1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah; 3. Kecamatan; 4. Kelurahan	
17.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara an Bengkel Umum Kendaraan Bermotor	V		1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya; 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor; 4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan	V		1. Dinas Perhubungan 2. Badan Lingkungan Hidup 3. Badan Perencanaan Pembangunan .	

					Nomor KM.551/MPP/Kep/10/1999 tentang Bengkel Umum Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor KM.191/MPP/Kep/6/2001.				
18.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum	Penyempurnaan pedoman dalam Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum		V	1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan KendaraanUmum		V	Dinas Perhubungan.	
19.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Penyesuaian tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya		V	-		V	3. Dinas Kesehatan; 4. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.	
20.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan.	

21.	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	V		1. Badan Perencanaan Pembangun; 2. Badan Koordinasi dan Pelayanan Penanaman Modal; 3. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	
22.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Pemungutan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	V		Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	V		1. Dinas Kebersihan dan Pertamanan; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;	
23.	Pembangunan Jaringan Utilitas Terpadu di Kota Surabaya	pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jaringan utilitas di Kota Surabaya	V		Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010	V		1. Badan Perencanaan Pembangun; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.	
24.	Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya	Pedoman dalam menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Surabaya	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah	V		1. Badan Perencanaan Pembangun; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 4. Bagian Perlengkapan.	
25.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	
26.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak	Penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan	

	Daerah								
27.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Penetapan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	V		Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol	V		1. Dinas Perdagangan dan Perindustrian; 2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;	
28.	Pencabutan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi	Mencabut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan serta Pusat Perbelanjaan Pasar Turi	V		-		V	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
29.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya	Penyempurnaan tujuan, kinerja dan organisasi Perusahaan Daerah Pasar Surya guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat		V	-		V	1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Pasar Surya;	
30.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada	V		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011	V		1. Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah; 2. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada.	
31.	Zonasi Pesisir Kota Surabaya	Zonasi Pesisir Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	V		1. Badan Perencanaan Pembangun; 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	
32.	Pemberian Nama Jalan, tempat	Pemberian Nama Jalan, tempat	V		-	V		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	

	Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan	Rekreasi, Taman dan Tempat Lain untuk Jalan							
33.	Rumah Susun	Pengaturan Rumah Susun	V		Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun	V		1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;	
34.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Penambahan obyek retribusi Izin Mendirikan Bangunan		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	
35.	Rencana Detail Tata Ruang Kota	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kota	V		Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	V		1. Badan Perencanaan Pembanguna; 2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.	
36.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman	Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri, Perdagangan, Perumahan dan Permukiman		V			V	1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 3. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.	
37.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	V		-	V		1. Badan Lingkungan Hidup; 2. Dinas Kebakaran; 3. Dinas Perhubungan; 4. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 6. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah.	

38	RPJMD 2015-2020	RPJMD Kota Surabaya Tahun 2015-2020	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014	V		Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	
DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KUMULATIF TERBUKA									
. 39	1	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat putusan Mahkamah Agung	-	-	-	-	-	-	-
	2	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah							
	3	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri/Gubernur Jawa Timur							
	4	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan							

SURABAYA, 12 Nopember 2014

DEWAN PERWAKILAN RAYAT DAERAH
KOTA SURABAYA
WAKIL KETUA

MASDUKI TOHA